



## **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN WAJO TAHUN 2022**

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan ringkasan LPPD Tahun 2022, berisi laporan kinerja Pemerintahan Kabupaten Wajo selama 1 (satu) tahun.

Materi RLPPD merupakan rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wajo Tahun 2022 yang bersumber dari Laporan tiap perangkat daerah yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, sebagai bentuk perwujudan implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 (Satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

### **I. DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## II. GAMBARAN UMUM DAERAH

### a. Batas Administrasi Daerah

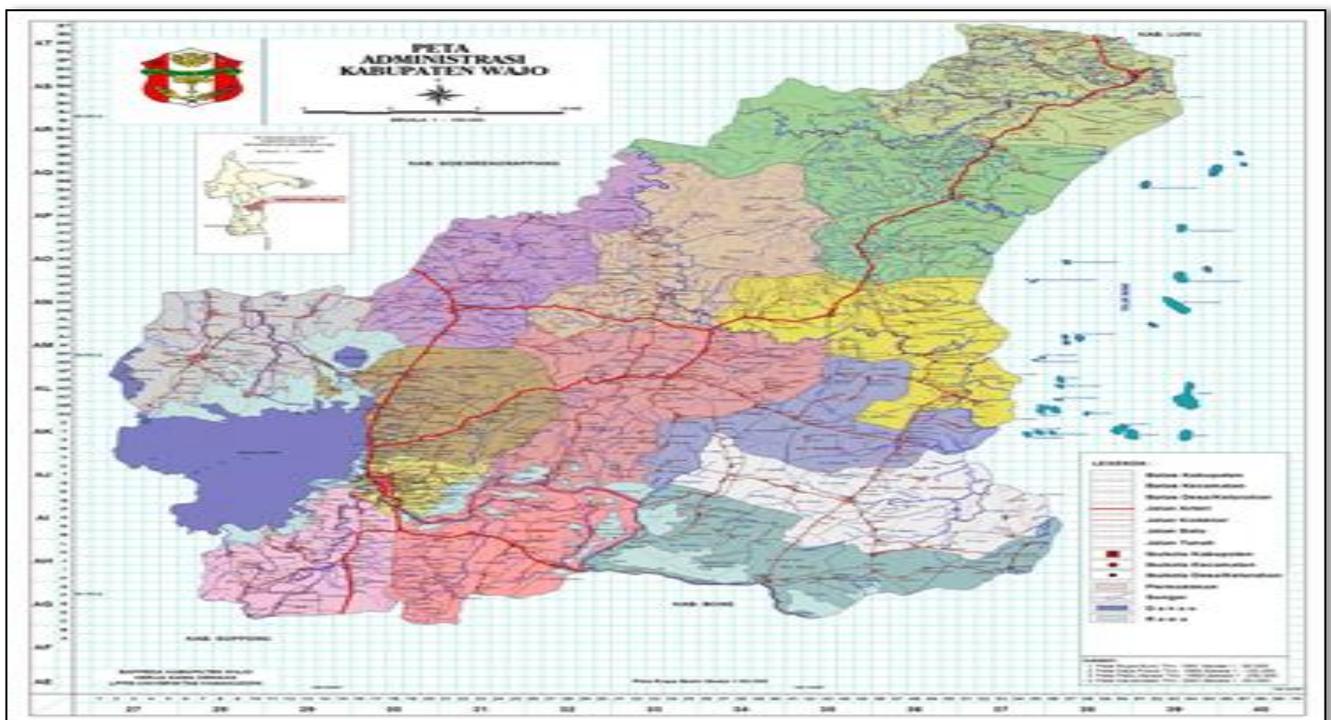
Kabupaten Wajo secara geografis adalah salah satu dari 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo, yang terletak pada posisi astronomis di koordinat antara 3°39' - 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' - 120°27' Bujur Timur, dengan luas 2.506,19 km<sup>2</sup> atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara. Dataran rendah terletak di bagian timur, selatan, tengah, dan barat. Danau Tempe terletak di bagian barat sedangkan pesisir pantai membentang di sebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai.

Batasan administrasi Kabupaten Wajo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar berikut.

### Peta Administrasi Kabupaten Wajo



Sumber : RPJMD Perubahan 2019-2024 Kabupaten Wajo Tahun 2021

Sedangkan secara geostrategis regional Pulau Sulawesi, maka Kabupaten Wajo yang berada pada bagian selatan merupakan daerah yang dilewati jalur transportasi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi strategis tersebut dapat membawa dampak bagi eksistensi Kabupaten Wajo terhadap mobilitas baik barang/jasa maupun orang. Posisi Kabupaten Wajo dengan ibukotanya di Sengkang, merupakan daerah transit, dengan akses penghubung ke daerah-daerah lain yang berpusat pada wilayah strategis baik di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Toraja.

Kabupaten Wajo dalam konstelasinya dengan Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk bagian dari Kawasan Andalan Watampone dengan pusat pengembangan ditetapkan di Watampone. Selain itu, dalam kebijaksanaan penetapan kawasan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan kawasan Wajo sebagai kawasan pengembangan tanaman pangan dengan pusatnya di Kota Sengkang yang berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah pertanian.

#### **b. Luas Wilayah**

Kabupaten Wajo memiliki luas 2.506,19 km<sup>2</sup>, yang meliputi 14 Kecamatan terdiri dari 190 desa/kelurahan dimana terdapat 48 Kelurahan dan 142 Desa. Adapun luasan wilayah administrasi Kabupaten Wajo menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel**  
**Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan**  
**Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	% Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbangparu	132.75	5.3	12	3	<b>15</b>
2	Tempe	38.27	1.53	0	16	<b>16</b>
3	Pammana	162.1	6.47	14	2	<b>16</b>
4	Bola	220.13	8.78	10	1	<b>11</b>
5	Takkalalla	179.76	7.17	11	2	<b>13</b>
6	Sajoanging	167.01	6.66	6	3	<b>9</b>
7	Penrang	154.9	6.18	9	1	<b>10</b>
8	Majauleng	225.92	9.01	14	4	<b>18</b>
9	Tanasitolo	154.6	6.17	15	4	<b>19</b>
10	Belawa	172.3	6.88	6	3	<b>9</b>
11	Maniangpajo	175.96	7.02	5	3	<b>8</b>
12	Gilireng	147	5.87	8	1	<b>9</b>
13	Keera	368.36	14.7	9	1	<b>10</b>
14	Pitumpanua	207.13	8.26	23	4	<b>27</b>
<b>Jumlah</b>		<b>2,511.19</b>	<b>100</b>	<b>142</b>	<b>48</b>	<b>190</b>

Sumber : RPJMD Perubahan 2019-2024 Kabupaten Wajo Tahun 2021

### c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 392.437 (ribu) jiwa meningkat menjadi 400.118 (ribu) jiwa pada tahun 2022. Pertumbuhan terbesar rerata jumlah penduduk Kecamatan di Kabupaten Wajo tahun 2021 – 2022 pada Kecamatan Tempe sebesar 0,14% dan rerata laju pertumbuhan penduduk terendah di Kecamatan Belawa sebesar – 0,05 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan**  
**Tahun 2021– 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)		Rerata Laju Pertumbuhan 2021 -2022
		2021	2022	
1	Sabbangparu	25.664	26.098	0,08
2	Tempe	66.143	67.581	0,14
3	Pammana	31.894	32.583	0,07
4	Bola	20.510	20.934	0,07
5	Takkalalla	20.550	20.806	0,08
6	Sajoanging	18.033	18.309	0,07
7	Penrang	15.470	15.805	0,08
8	Majauleng	31.998	32.656	0,08
9	Tanasitolo	40.398	41.090	0,07
10	Belawa	30.669	31.386	0,05
11	Maniangpajo	16.652	16.946	0,07
12	Gilireng	11.412	11.587	0,10
13	Keera	21.221	21.659	0,07
14	Pitumpanua	41.823	42.680	0,08
<b>Wajo</b>		<b>392.437</b>	<b>400.118</b>	<b>0,08</b>

Sumber : *SIAK (System Informasi Administrasi Kependudukan) Tahun 2022*

### III. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

**Tabel.**  
**INDIKATOR KINERJA MAKRO**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA MAKRO</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2022</b>	<b>Perubahan (%)</b>
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<b>69,62</b>	<b>70,26</b>	<b>0,92</b>
2	Angka Kemiskinan	<b>6,46</b>	<b>6,57</b>	<b>1,70</b>
3	Angka Pengangguran	<b>4,32</b>	<b>2,54</b>	<b>-41,20</b>
4	Pertumbuhan Ekonomi	<b>6,77</b>	<b>2,38</b>	<b>-64,84</b>
5	Pendapatan Per Kapita	<b>58.830</b>	<b>64.136</b>	<b>9,019</b>
6	Ketimpangan Pendapatan	<b>0,361</b>	<b>0,375</b>	<b>3,87</b>

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV, BPS 2022

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Makro diatas dapat dijelaskan masing-masing indicator adalah sebagai berikut :

### **1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Menurut metodologi baru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui pendekatan tiga Dimensi dasar yaitu Dimensi kesehatan melalui Umur Harapan Hidup; Dimensi pendidikan yang terdiri dari *Harapan Lama Sekolah* dan *Rata- Rata Lama Sekolah*; dan Dimensi Hidup Layak yang dihitung dari *Pengeluaran per kapita Disesuaikan*.

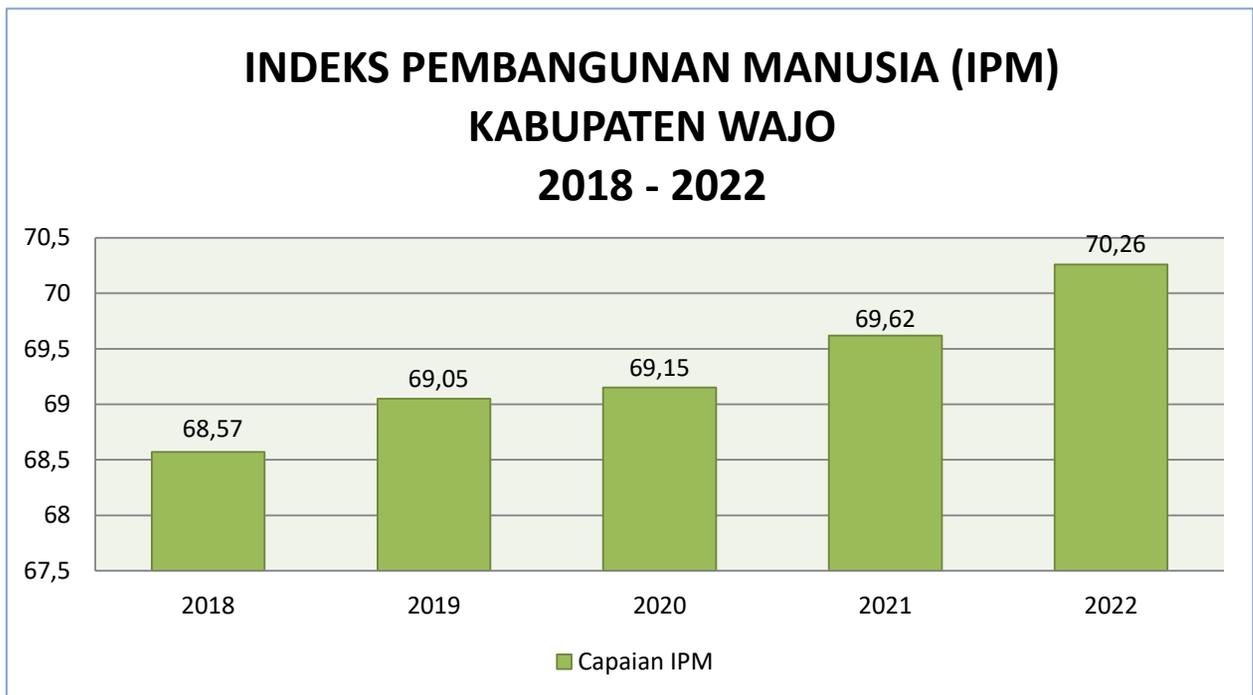
Berikut komponen pembentuk IPM kabupaten Wajo selama 2 (dua) tahun terakhir:

**Tabel**  
**Komponen Pembentuk IPM**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1</b>	Umur Harapan Hidup	67,48	67,82
<b>2</b>	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	13,30
<b>3</b>	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,05	7,16
<b>4</b>	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp )	12.505	12,729

Sumber :Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, BPS 2022

IPM Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun laju pertumbuhannya berfluktuasi. Pada tahun 2022, nilai IPM sebesar 70,26. Nilai tersebut mengalami peningkatan 0,92 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,62. Pada saat ini IPM Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori “sedang”, karena termasuk dalam *range*  $60 \leq \text{IPM} < 70$ . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini tentang IPM Kabupaten Wajo dari tahun 2018-2022



Sumber : Wajo Dalam Angka Tahun 2018-2022

## 2. Angka Kemiskinan

Dalam mengukur Angka kemiskinan dalam suatu kabupaten kota digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran dari perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

**Tabel**  
**Indikator Perkembangan Kemiskinan Kab. Wajo 2021 – 2022**

Indikator	2021	2022
<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)</b>	<b>26,22</b>	<b>26,75</b>
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>	<b>0,79</b>	<b>0,86</b>
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</b>	<b>0,15</b>	<b>0,21</b>
<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>	<b>6,46</b>	<b>6,57</b>
<b>Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)</b>	<b>361.181</b>	<b>375.022</b>

Sumber : Wajo Dalam Angka Triwulan 4 2022, BPS 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat Garis Kemiskinan Kabupaten Wajo meningkat selama periode 2021 – 2022. Salah satu penyebab kenaikan atau

penurunan tersebut tentunya adalah adanya inflasi atau kenaikan harga barang barang pada beberapa kelompok komoditas.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada dalam 2 Tahun terakhir mengalami fluktuasi. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,79 di tahun 2021 sedangkan tahun 2022 menjadi 0,86. Nilai P1 yang meningkat menunjukkan rata – rata pengeluaran penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan semakin meningkat.

Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,15 pada tahun 2021, di tahun 2022 meningkat menjadi 0,21. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat persentase penduduk miskin Kabupaten Wajo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berikut ini :



Sumber : Wajo Dalam Angka Tahun 2018-2022

### 3. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Pada Tahun 2022 angka pengangguran Terbuka pada Kabupaten Wajo cenderung meningkat bahkan peningkatannya sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar -41,20% dimana pada tahun 2021 angka pengangguran sebesar 4,32 menurun pada tahun 2022 menjadi 2,54. Untuk

lebih jelasnya perkembangan tingkat pengangguran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



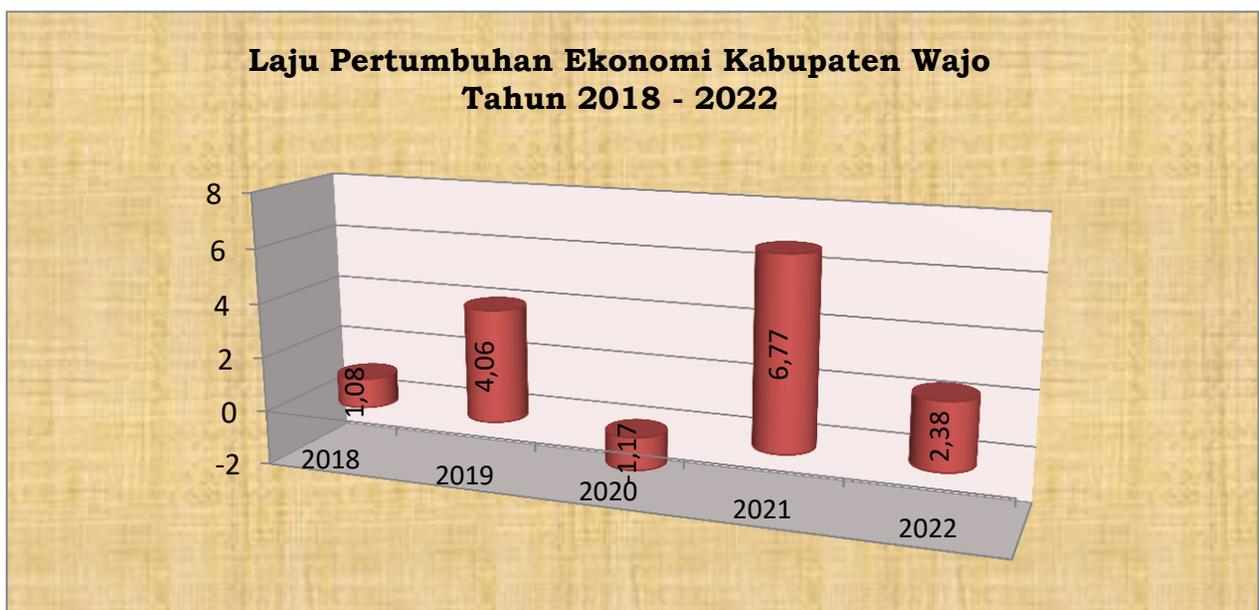
Sumber : Wajo Dalam Angka Tahun 2018-2022

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan Perkembangan produksi barang dan jasa suatu wilayah perekonomian dari tahun t-1 ke tahun t yang diukur berdasarkan pdrb atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi mengindikasikan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Pertumbuhan yang positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo dimana pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kab. Wajo sebesar -64,84 persen, hal ini diakibatkan adanya beberapa lapangan usaha banyak yang tertutup.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Wajo Dalam Angka Tahun 2018-2022

## 5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per Kapita diukur dari dihitung berdasarkan PDRB per kapita berdasarkan Harga Berlaku (ADHB) pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Dimana **PDRB per kapita** adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara **PDRB** dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per Kapita Kabupaten Wajo cenderung meningkat sebesar 9,019 % dari 58,83 pada Tahun 2021 menjadi 64,13 pada Tahun 2022. Yang artinya dari sisi lapangan usaha 1 orang penduduk dapat menciptakan pendapatan sebesar 64,13 juta rupiah per tahun.

Berikut adalah perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Sumber : Wajo Dalam Angka Tahun 2018-2022

## 6. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Gini Ratio. Nilai ini berkisar antara 0 - 1, dimana semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik maka dapat dilihat pada Tahun 2021, Gini Ratio Kabupaten Wajo adalah sebesar 0,361. Angka ini turun sebesar 3,87 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2022 yang besarnya 0,375.

Berikut adalah perkembangan ketimpangan pendapatan Kabupaten Wajo dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.



Sumber : Wajo Dalam Angka Tahun 2018-2022

#### IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR.

Capaian pelaksanaan kinerja urusan pelayanan dasar Kabupaten Wajo tahun 2022 dalam laporan ini memuat capaian kinerja kunci outcome sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

##### a. Urusan Pendidikan.

Capaian penyelenggaraan Urusan Pendidikan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN	
		2021	2022
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	80,73%	81,51%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	89,91%	88,31%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	55,80%	58,12%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	2,82%	0,50%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo Tahun 2022

##### b. Urusan Kesehatan.

Capaian penyelenggaraan Urusan Kesehatan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Kesehatan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN	
		2021	2022
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	8,78%	0,12%
2	Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	50%	50,00%
3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,85%	100%
4	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	100,38%	101,61%
5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	102,45%	101,45%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,83%	97,65%
7	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	99,54%	100%

8	Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72,14%	93,27%
9	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55,85%	86,01%
10	Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42,62%	86,28%
11	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69,27%	98,24%
12	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	82,26%	100%
13	Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	121,97%
14	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	105,62%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun 2022

### c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN	
		2021	2022
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	Diambil alih Provinsi	Diambil alih Provinsi
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Diambil alih Provinsi	Diambil alih Provinsi
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	70,66%	31,61%
4	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	87,26%	90,70%
5	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,84%	90%
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100%	100%
7	Tingkat kemantaban jalan kabupaten/kota	47,17%	49,69%
8	Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74,47%	121,19%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	TDI	100%

Sumber : Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo tahun 2022

**d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman .**

Capaian penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN	
		2021	2022
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	26,30%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Tidak ada Relokasi ditahun 2021	Tidak ada Relokasi ditahun 2022
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	20,75%	37,38%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,51%	5,27%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	14,21%	7,03%

Sumber : Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Wajo tahun 2022

**e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**

Capaian penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN	
		2021	2022
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	20%	20%
3	Mengukur Informasi jangkauan rawan bencana	100%	100%
4	Mengukur jangkauan layanan penceahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	13%	52%
5	Mengukur layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	20%	24%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	73,58%	74,55%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	16,9 Menit	13,7 Menit

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Wajo tahun 2022

#### **f. Urusan Sosial .**

Capaian penyelenggaraan Urusan Sosial berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN	
		2021	2022
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	29,13%	9,63%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	74,99%	1,03%

*Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo tahun 2022*

#### **V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.**

##### **a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**

Untuk hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, 2021 dan 2022, sampai saat penyusunan Ringkasan ini belum dirilis dari Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kementerian Dalam Negeri tentang Hasil EPPD Kabupaten/Kota.

##### **b. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya.**

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 memperoleh penghargaan capaian kinerja keuangan yang baik ditandai dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2021. Ini merupakan penghargaan capaian keuangan Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 8 kalinya. Namun untuk opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2022 masih dalam proses audit oleh BPK.

#### **VI. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH.**

##### **a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Tahun 2022, jika dilihat dari sisi pendapatan tercatat mengalami pengurangan yang signifikan terutama pada pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dan di ikuti dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada perubahan anggaran tahun 2022 menargetkan pendapatan sebesar Rp. 1.460.089.873.730,00,- dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.437.916.981.087,29,- atau 98,48% (*unaudited*), untuk lebih jelasnya mengenai target dan realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	ANGGARAN	REALISASI	(%)
2	3	4	6
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.460.089.873.730,00</b>	<b>1.437.916.981.087,29</b>	<b>98,48</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>162.855.347.697,00</b>	<b>154.797.102.869,29</b>	<b>95,05</b>
Pajak Daerah	45.256.500.000,00	48.284.683.827,00	106,69
Retribusi Daerah	16.003.743.364,00	13.037.822.259,00	81,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.672.797.933,00	16.672.797.933,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	84.922.306.400,00	76.801.798.850,29	90,44
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.286.447.416.773,00</b>	<b>1.268.748.085.265,00</b>	<b>98,62</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.202.065.638.773,00	1.185.027.476.280,00	98,58
Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.381.778.000,00	83.720.608.985,00	99,22
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>10.787.109.260,00</b>	<b>14.371.792.953,00</b>	<b>133,2</b>
Pendapatan Hibah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.787.109.260,00	14.371.792.953,00	133,23
	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022

#### **b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan

kesejahteraan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka pengelolaan belanja daerah menganut kebijakan pengalokasian dana terdapat empat jenis belanja yaitu : Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer yang dapat diuraikan sebagaimana berikut berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA):

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	ANGGARAN	REALISASI	(%)
2	3	4	6
<b>BELANJA</b>	<b>1.502.288.621.049,76</b>	<b>1.323.080.758.611,00</b>	<b>88,07</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.004.106.580.354,76</b>	<b>895.215.403.434,63</b>	<b>89,16</b>
Belanja Pegawai	632.028.131.193,76	579.368.960.402,00	91,67
Belanja Barang dan Jasa	336.379.162.936,00	290.562.359.430,00	86,38
Belanja Bunga	3.186.313.729,00	3.186.313.729,00	100,00
Belanja Hibah	30.806.472.496,00	21.844.019.873,63	70,91
Belanja Bantuan Sosial	1.706.500.000,00	253.750.000,00	14,87
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>297.427.859.258,00</b>	<b>232.546.916.422,37</b>	<b>78,19</b>
Belanja Modal Tanah	4.448.000.000,00	2.054.408.000,00	46,19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.237.648.271,00	40.821.360.056,65	79,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.649.725.028,00	68.659.538.144,00	94,51
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.857.035.596,00	120.597.652.221,72	73,60
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.235.450.363,00	413.958.000,00	7,91
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>9.600.642.237,00</b>	<b>4.599.895.328,00</b>	<b>47,91</b>
Belanja Tidak Terduga	9.600.642.237,00	4.599.895.328,00	47,91
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>191.153.539.200,00</b>	<b>190.718.543.426,00</b>	<b>99,77</b>
Belanja Bagi Hasil	5.820.253.400,00	5.675.233.300,00	97,51
Belanja Bantuan Keuangan	185.333.285.800,00	185.043.310.126,00	99,84
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(42.198.747.319,76)</b>	<b>114.836.222.476,29</b>	<b>(272,13)</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022

### c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yakni Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutupi deficit anggaran yaitu bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

1. Penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
6. Penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	ANGGARAN	REALISASI	(%)
2	3	4	6
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>42.198.747.319,76</b>	<b>58.618.672.844,43</b>	<b>138,91</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>55.792.256.385,76</b>	<b>68.543.326.932,43</b>	<b>122,85</b>
Penghematan Belanja	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Sisa Dana Akibta Tidak Tercapainya Target Kinerja dan Sisa Dana Peng.Pembiay	49.792.256.385,76	49.792.256.385,76	100,00
Sisa Lebih Penrhitungan Anggaran BLUD	0,00	11.668.997.729,00	0,00
Sisa Dana BOS	0,00	77.136.146,00	0,00
Sisa Dana Kapitasi	0,00	1.004.936.671,67	0,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>13.593.509.066,00</b>	<b>9.924.654.088,00</b>	<b>73,01</b>
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.593.509.066,00	4.924.654.088,00	57,31
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>42.198.747.319,76</b>	<b>58.618.672.844,43</b>	<b>138,91</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(0,00)</b>	<b>173.454.895.320,72</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022

## VII. INOVASI DAERAH.

Berdasarkan Hasil Laporan Inovasi Daerah yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pada Tahun 2022 terdapat beberapa pencapaian Inovasi Daerah yang dilaporkan melalui Indeks Inovasi Daerah yang merupakan hasil penilaian dan pengukuran Kementerian Dalam Negeri terhadap Inovasi yang dilaporkan oleh

Pemerintah Daerah secara terukur dan Transparan. Hasil pengukuran ini disampaikan secara elektronik melalui situs web.

Untuk Tahun 2022 Pemerintah Wajo mengajukan 10 Jenis Inovasi, namun yang memenuhi syarat dan masuk kategori sebanyak 5, yaitu :

**Tabel Inovasi Daerah Kabupaten Wajo**

<b>NO</b>	<b>JUDUL INOVASI</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>BENTUK INOVASI</b>
1	PINISI (Pusat Informasi Perencanaan Berbasis NIK)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wajo	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
2	MASKER PELITA (Masyarakat Keera Peduli Disabilitas)	Puskesmas Keera Kab. Wajo	Inovasi Pelayanan Publik
3	PENTAGRAM (Pelayanan Online Administrasi Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo	Inovasi Pelayanan Publik
4	SIPADUPPAI (Layanan Pindah Datang)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wajo	Inovasi Pelayanan Publik
5	OTO DOTTORO	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik

*Sumber : Indeks Inovasi Daerah Kab. Wajo, Bappelitbangda, 2022*

### **VIII. PENGHARGAAN.**

Sepanjang Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Wajo berhasil mendapatkan penghargaan pada tingkat Provinsi dan Nasional, diantaranya adalah :

1. Piagam Penghargaan Atas Partisipasi dan Dukungannya Pada Kegiatan Being a Good Leader Jambore Cabang Wajo tahun 2022;
2. Piagam Penghargaan Atas Prestasi dan Dedikasinya Dalam Percepatan Capaian Target Vaksinasi Covid 19 di Wilayah Kabupaten Wajo;
3. Piagam Penghargaan Sebagai Juara II Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
4. Piagam Penghargaan Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Seminar Kebangkitan Potensi Desa Dengan Tema " Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Kadin dan Pemerintah Daerah Membangkitkan Ekonomi Desa"
5. Piagam Penghargaan Atas Inovasi Tangkap Ikan Tokke Jadikan Bahan Layak (TIK TOK JABLAY);
6. Piagam Penghargaan Atas Prestasi dan Dedikasinya Dalam Percepatan Capaian Target Vaksinasi Covid 19 di Wilayah Kabupaten Wajo.;

7. Penghargaan Atas Keberhasilannya Mewujudkan Desa/Kelurahan Sebagai DESA ZERO PERKAWINAN ANAK periode Januari - Juni Tahun 2022
8. Piagam Penghargaan Kategori Perangkat Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Penunjang dan Pendukung Dengan Nilai 69 The Best Figure Regent 2022;
9. Penghargaan Atas Inovasi Satuan Tugas Administrasi Kependudukan Penduduk Rentan;
10. Penghargaan atas prestasi dan dedikasi dalam percepatan capaian target vaksinasi Covid 19 di Wilayah Kabupaten Wajo;
11. Pemenang I Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan mendapatkan penghargaan untuk kategori tenaga kesehatan teladan di fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Nasional;
12. Kabupaten /Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat berkelanjutan pada upaya memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam mempertahankan layanan sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan Tahun 2022 dan mendapatkan tanda penghargaan STBM Berkelanjutan.;
13. Piagam atas Pembinaan Terbaik Dalam Penegakan Peraturan Daerah tahun 2022, dari Kementerian Dalam Negeri;
14. Piagam penghargaan atas partisipasinya dalam pemenuhan data matriks evaluasi APE 2022 dan penyedia layanan responsive gender lengkap Kab. Wajo;
15. Prestasi dan apresiasi terbaik dalam penyajian data statistik perkebunan yang tertuang dalam laporan se kabupaten/kota se Sulawesi selatan;
16. Anugerah penghargaan OPD peringkat kedua dengan tax ratio tertinggi tahun 2021 kategori pagu anggaran 10-50 miliar rupiah;
17. Piagam Penghargaan Poktan dengan pemanfaatan embung terbaik.
18. Anugerah perkebunan Indonesia kategori pengawalan dan pendampingan kebijakan pembangunan perkebunan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia.;
19. Sertifikat Program Kampung Iklim Desa Simpursia Kec. Pammana Kab. Wajo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
20. Sertifikat Program Kampung Iklim Desa Bola Kec. Bola Kab. Wajo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
21. Sertifikat Apresiasi Pembinaan Proklamasi Kabupaten Wajo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
22. Penghargaan Chapter 2022 Pasar Digital Kategori Pemerintah Daerah yaitu Juara I oleh Bank Indonesia.;

23. Piagam Penghargaan Pemerintah Kabupaten Wajo atas kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyelesaian KP PNS dengan Aplikasi Si-ASN Periode Oktober Tahun 2022 di Lingkup Pemerintah Kabupaten.;
24. Piagam penghargaan Pemerintah Kabupaten Wajo atas Keberhasilannya menerapkan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021 dengan Kualitas baik oleh KASN.;

## **IX. PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wajo sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintahan. Beberapa capaian kinerja pembangunan berdasarkan pendekatan indikator makro yang diperlukan untuk mengukur perkembangan sosial dan ekonomi Kabupaten Wajo berdasarkan kecenderungan (*trend*) beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Wajo bertekad mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal di masa mendatang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mencapai sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Wajo.

Semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 ini dapat menjadi bahan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam memberikan masukan yang konstruktif guna mewujudkan Kabupaten Wajo yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.

Sengkang, 31 Maret 2023

**BUPATI WAJO,**



**Dr. H. AMRAN MAHMUD M.Si**